

ABSTRAKS

Skripsi berjudul "**Pengaruh Perundingan Bipartit Terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Hubin) di PT. PERTAMINA (Persero) Unit Pengolahan I**" dimaksudkan untuk meneliti Hubungan Industrial yang terjadi di lingkungan PT. PERTAMINA (Persero) Unit Pengolahan I. Berdasarkan analisis secara fundamental bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini diselenggarakan yaitu tanpa melalui perundingan Bipartit, kecenderungannya bahwa setiap keputusan yang diambil dilakukan secara sepihak, hal ini jelas telah merugikan pekerja dan dinyatakan masih kurang *representatif*. Walau sebenarnya rasio dalam menghasilkan solusi terbaik terhadap penyelesaian perselisihan Hubin menjadi salah satu indikator bagi perusahaan dalam menciptakan *image*, namun sejauh ini proses penyelesaian perselisihan Hubin di PT PERTAMINA (Persero) senantiasa dilakukan di luar Peraturan Perundang-undangan .

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Perundingan Bipartit memiliki pengaruh terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubin. Penelitian ini merupakan penelitian kausal, sedangkan metode yang digunakan yaitu kuesioner, survey, dan komunikasi tatap muka. Penetapan populasi *sample* diambil dengan menggunakan rumus *Slovin* dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan hasil penyelesaian hubin sebelum adanya penerapan mekanisme perundingan Bipartit periode tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2005 dan sesudah adanya perundingan Bipartit. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dilakukan uji validitas dan korelasi dengan menggunakan teknik *Pearson Product Moment* sehingga dapat diketahui reliabilitas jawaban responden, sementara itu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perundingan Bipartit terhadap penyelesaian perselisihan Hubin, peneliti menggunakan teknik *Chi-square* terhadap jawaban responden.

Berkembangnya Peraturan Perundang-undangan yang semakin kuat mengikat para pihak yang berselisih, konsep yang ditawarkan yaitu melalui Perundingan Bipartit dengan perannya menganulir penerapan aturan penyelesaian hubin yang dianggap tidak transparan dan kurang objektif. Realitas hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perselisihan hubin melalui mekanisme perundingan Bipartit menunjukkan adanya obyektivitas dan transparansi dari berbagai aspek dan keputusan yang ditetapkan telah memenuhi konsep berkeadilan dan "Terbaik bagi pekerja dan terbaik bagi perusahaan". Dengan kata lain dinyatakan bahwa antara perundingan Bipartit dengan penyelesaian perselisihan Hubin memiliki hubungan yang signifikan serta memiliki makna yang cukup positif.